

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Harus diakui, politik merupakan sesuatu yang kompleks. Kompleksitas politik disebabkan oleh dua hal berikut: *pertama*, ruang lingkup politik meliputi jaringan hubungan antara orang perorangan, kelompok, organisasi, lembaga, dan bangsa-bangsa, yang tidak sederhana dan statis tetapi selalu berubah dan berkembang selaras dengan meningkatnya aktivitas-aktivitas dan juga perubahan yang terjadi di sekitarnya. Dalam politik relasi-relasi selalu ditandai oleh kepentingan tertentu dan karena itu selalu berubah setiap saat. *Kedua*, politik terkait dengan begitu banyak aspek atau faktor lain seperti moralitas, sosial, ekonomi dan budaya. Politik selalu mengandaikan pluralitas orang yang bertindak dan berbicara bersama. Sekalipun term dunia dan politik digunakan dalam pengertian yang sama, tetapi Arendt lebih sering menggunakan term dunia karena perhatiannya yang besar terhadap apa yang terjadi dalam dunia.¹

Pemikiran politik Hannah Arendt bertolak dari ‘thought of fragment’s, pemikiran atas fragmen-fragmen atau peristiwa-peristiwa aktual yang terjadi dimasa lampau. Seperti seorang penyelam mutiara yang menyelam ke kedalaman laut untuk melepaskan mutiara dari batu karang dan membawa mutiara ke permukaan, Arendt pun mendalami Masa lampau dan membawa ke dunia politik kontemporer apa yang hidup atau apa yang bertahan hidup dalam sebuah bentuk yang baru. Arendt menulis: Peristiwa-peristiwa, masa lalu ataupun masa sekarang adalah benar, dan guru yang dapat dipercayai karena mereka adalah sumber informasi utama bagi orang yang terlibat dalam politik.² Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa Arendt menekankan pentingnya

¹ Yosef Keladu Koten, *Etika Keduniawian* (Maumere: Ledalero, 2018), hlm. 4.

² Maksimilianus Jemali, *Tindakan Politik Perspektif Hannah Arendt* (Maumere: Ledalero, 2017), hlm. 13.

memperhatikan aktualitas dari peristiwa yang menampakan diri kepada kita karena keyakinan bahwa ada sesuatu yang baru dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam dunia ini.

Banyak negara di dunia terpecah belah karena adanya pengalaman akan kolonialisasi, perang antar-etnis, kejahatan melawan kemanusiaan seperti tragedi Holocaust dan *ethnic cleansing*, dan sejarah panjang eksklusif dan diskriminasi melawan kelompok-kelompok minoritas karena etnisitas, agama dan ideologi mereka. Mengutip Kant, Arendt menyebut kejahatan rezim Hitler itu dengan kejahatan radikal (*radical evil*) karena kodrat kejahatan tersebut tidak diketahui oleh masyarakat umum tetapi menghancurkan segala sesuatu yang ada dalam dunia, termasuk manusia. Kehancuran dunia inilah yang disebut Arendt dengan *worldlessness*, sebuah kondisi dimana dunia kehilangan maknanya sebagai sebuah ruang publik penampakan individu-individu yang distingtif dan bebas.³

Orang-orang yang terlibat banalitas kejahatan tidak memiliki kesadaran dan hati nurani, sehingga sebagai seorang individu, mereka tidak pernah melakukan pengujian dalam dirinya.⁴ Menurut Arendt, kekerasan tidak terpisahkan dari sikap modernitas. Menurutnya pada saat manusia moderen berada dalam kesepian akibat atomisasi yang ditimbulkan oleh modernitas, lalu muncul kekuasaan yang menawarkan ideologi. Dengan menelaah ideologi yang diterapkan oleh penguasa totaliter sebagaimana yang dilakukan Arendt, dapat dilihat bahwa ideologi yang berlaku pada tipe kekuasaan seperti itu adalah ideologi tertutup, yang tidak memberi ruang bagi argumentasi kritis dan menolak perbedaan. Ideologi tertutup dirancang melalui mekanisme propaganda dan terror.

³ Yosef Keladu Koten, *Etika Keduniawian, Op. Cit.*, hlm. viii

⁴ Riekh Diah Pitaloka, *Banalitas Kekerasan; Telaah Pemikiran Hannah Arendt Tentang Kekerasan Negara* (Depok: Koekoesan, 2010), hlm. IX-X.

Teror merupakan instrumen yang tidak tertandingi, mengandung unsur kekerasan yang sangat besar. Teror juga sebuah pelaksana hukum gerakan yang tujuan akhirnya bukan kemakmuran manusia atau kepentingan satu orang tetapi rekayasa manusia, menyingkirkan “individu tak berguna” demi kepentingan spesies manusia unggul, mengorbankan “bagian” demi kepentingan “keseluruhan”.⁵ Propaganda dan teror mengakibatkan hilangnya spontanitas pada diri manusia. Manusia hanyalah benda yang bergerak, kemampuan imajinatifnya telah mati. Manusia seperti ini tidak punya kesadaran dan mengalami ketumpulan atau penyimpangan nurani.

Berhadapan dengan persoalan-persoalan ini, pada tahun-tahun terakhir rekonsiliasi, sebuah term yang kental dengan moralitas dan religius, telah digunakan secara luas sebagai sarana politik untuk mengatasi beban sejarah dan perpecahan masyarakat. Pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi sejak tahun 1974, yang mana hasilnya ialah undang-undang kesatuan dan rekonsiliasi nasional yang diumumkan pada tanggal 26 Juli 1995 merupakan bukti nyata dari upaya politik untuk mempromosikan rekonsiliasi.⁶

Sekalipun demikian, frase rekonsiliasi politik itu sendiri kontradiktoris karena politik menunjuk pada penyingkapan, keterbukaan, konflik dan perbedaan; sementara rekonsiliasi dimaksudkan demi harmoni, kedamaian, konsensus dan penyelesaian sekali untuk selamanya. Sebagai tujuan, sesuatu yang harus dicapai, rekonsiliasi menunjuk pada sebuah aspirasi masa depan, sebuah ideal yang diharapkan, seperti harmoni, kedamaian atau consensus; sedangkan sebagai sebuah proses, sebuah sarana untuk mencapai tujuan, rekonsiliasi menunjuk pada cara-cara politik, sosial dan legal dalam menghadapi kesalahan masa lampau. Dari berbagai macam

⁵ J. M. Soebijanta, (penerj), *Asal-usul Totalitarisme Jilid III Totalitarisme* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm. 265-266. Diterjemahkan dari judul asli: *The Origin of Totalitarianism Part Three Totalirism*, Hannah Arendt. Florida: A Harvest Book Harcourt Brace And Compani, 1979.

⁶ Geiko Muler-Fahrenheit, *Rekonsiliasi* (Maumere: Ledalero, 2005), hlm. 176.

persoalan diatas, penulis ingin mengangkat tema dengan judul “ETIKA SOSIAL MANUSIA DAN KONTRIBUSINYA PADA REKONSILIASI POLITIK; SEBUAH STUDI ATAS PEMIKIRAN POLITIK HANNAH ARENDT”

1. 2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi pedoman untuk mendalami pemikiran Hannah Arendt mengenai rekonsiliasi politik adalah sebagai berikut:

1. Apa itu politik?
2. Apa itu rekonsiliasi politik menurut Hannah Arendt?
3. Elemen politik apa saja yang harus diprioritaskan dalam proses rekonsiliasi?

1. 3 Tujuan Penulisan

Hannah Arendt adalah seorang pemikir politik yang sangat populer di abad modern ini, Dalam pandangan Arendt tentang “rekonsiliasi politik” adalah akan diteliti secara mendalam sehingga dapat memunculkan pemahaman yang baru dan relevansi dalam memberi kontribusi dalam kehidupan berpolitik sekarang ini. Adapun tujuan dari penulis memilih filsuf ini dalam judul Etika Sosial Manusia Dan Kontribusinya Pada Rekonsiliasi Politik, Yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mengenal lebih dalam siapa itu Hannah Arendt serta karya-karya filosofis yang telah dihasilkannya.
2. Untuk mengetahui situasi politik dunia zaman Hannah Arendt.
3. Untuk mengetahui kontribusi pemikiran politik Hannah Arendt pada zamannya.

1. 4 Kegunaan Penulisan

1.4.1 Bagi Pemerintah Indonesia

Tulisan ini menampilkan gagasan penting yang sangat relevan dengan politik negara Indonesia saat ini, sehingga melalui tulisan yang amat sederhana ini, para pemimpin politik tidak saja menjalankan sistem pemerintahan secara totaliter, yang tidak mengindahkan serta menerima opini-opini serta pendapat dari masyarakat yang adalah subjek utama dalam suatu sistem pemerintahan. Yang mana para pemimpin negara adalah orang yang kepadanya tanggung jawab serta hak dari seluruh warga masyarakatnya diberikan. Ole karena itu, seorang pemimpin hendak menjalankan sistem pemerintahannya yang pro-rakyat. Pemimpin hendaknya mendengarkan aspirasi dari rakyatnya, dan juga pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kebaikan bersama dari seluruh elemen masyarakat yang dipimpinnya.

Dalam memimpin, hendaknya setiap pemimpin harus memperhatikan partisipasi serta aksi komunikasi warga dalam negara. Pemerintah harus menjamin kebebasan warga negaranya dalam bertindak dan berekspresi bukannya menindas kebebasan setiap warga negara atau setiap individu yang adalah subjek utama dalam suatu pemerintahan dalam menjalankan hak serta kewajiban politiknya. Sebab, manusia juga adalah makhluk politik, *zoon politikon* (Aristoteles). Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam politik adalah sesuatu yang sesuai dengan kodratnya sebagai manusia.

1.4.2 Bagi Civitas Akademika Fakultas Filsafat Unwira Kupang

Harapan dari penulis bagi Civitas Akademika Fakultas Filsafat Unwira Kupang, di mana semoga tulisan ini dapat semakin menambah khazanah pemahaman tentang rekonsiliasi politik agar setiap individu dapat mengerti tentang bagaimana politik yang baik dan benar.

1.4.3 Bagi Penulis

Tentunya pemikiran dari Hannah Arendt sangat berguna bagi penulis, sehingga penulis ingin mendalami secara lebih intensif, dan secara lebih istimewa dalam melihat serta memahami konsep-konsep besar yang dikembangkan oleh filsuf perempuan yang dikatakan sebagai filsuf yang kontroversial ini. Dan secara khusus penulis lebih memfokuskan pada konsep rekonsiliasi politik perspektif Hannah Arendt. Di samping itu dapat membantu penulis dalam membaca realitas politik yang sedang dijalankan oleh para pemimpin serta yang dialami oleh penulis sendiri, apakah mendukung partisipasi masyarakat dan khususnya penulis sendiri dalam menjalankan hak politik ataukah malah membatasi hak serta kebebasan penulis dalam partisipasi politik.

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Inventarisasi

Pemikiran Hannah Arendt yang terbesar dalam karya-karyanya, dikumpulkan dan dikaji peneliti secara khusus. Oleh karena itu, terlebih dahulu peneliti berusaha mengumpulkan karya-karyanya tentang sang tokoh.

1.5.2 Sintesis

Berdasarkan inventarisasi kepustakaan tentang Hannah Arendt, penulis berusaha untuk memahami tema yang telah diajukan; Etika Sosial Manusia Dan Kontribusinya Pada Rekonsiliasi Politik; Sebuah Studi Atas Pemikiran Politik Hannah Arendt”

1.5.3 Evaluasi Kritis

Penulis tidak hanya sampai pada studi kepustakaan tetapi penulis akan mencoba melengkapi dengan beberapa evaluasi dan catatan kritis. Dengan demikian, penulis dapat memahami secara komprehensif tentang “Etika Sosial Manusia Dan Kontribusi Politik Pemikiran Hannah Arendt”.

1.5.4 Pemahaman Baru

Langka-langka sebelumnya menjadi titik acuan bagi peneliti untuk membangun pengertian tentang pemahaman “Etika Sosial Manusia Dan Kontribusinya Pada Rekonsiliasi Politik” Perspektif Hannah Arendt. Dalam hal ini, pandangan politik Hannah Arendt akan diteliti secara mendalam sehingga memunculkan pemahaman yang baru tentang relevansi dengan kondisi politik yang terjadi sekarang ini.